

FENOMENA *BLUSUKAN* DALAM MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK JOKO WIDODO

THE PHENOMENON OF BLUSUKAN IN THE ROLE OF POLITICAL LEADERSHIP OF JOKO WIDODO

A.Zulkarnain
Universitas Nasional
zulkarnain4545@gmail.com

Syamsuddin Harris
Universitas Nasional
sy_haris@yahoo.com

Abstract

Joko Widodo becomes a political phenomenon in his own way. Taken from three process of Pilkada, two times in Solo (period 2005 and 2010), or one time in DKI (2012), also Pilpres in 2014, has succeeded to make him the winner. Blusukan of Jokowi has created pro and contra in community. Some people think that Jokowi looked for an image, while some others agree with him. Those who agree with him think if blusukan is succeeded to make him closer and more aspirative to the community. By using qualitative method, hence, there are five models connected with the political leadership of Jokowi; the leadership of servants, horizontal, populists, democracy, charismatics and democratic. Moreover, both servants and horizontal leadership are the best among others.

Keywords: Joko Widodo, blusukan, leadership.

Abstrak

Joko Widodo menjadi fenomena politik tersendiri. Dari tiga proses pilkada yang telah di lewat baik di Solo sebanyak dua kali (2005 dan 2010), maupun di DKI satu kali (2012), serta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, telah berhasil menjadikannya sebagai pemenang. Model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka blusukan telah menciptakan pro-kontra di tengah masyarakat. Ada beberapa pihak yang menganggapnya hanya merupakan strategi pencitraan, sebagian yang lain setuju karena melihat blusukan merupakan cara Joko Widodo untuk bisa lebih dekat dan aspiratif kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori kepemimpinan, maka, ada lima model yang terkait dengan kepemimpinan politik Joko Widodo, yakni kepemimpinan pelayan, pemimpin horisontal, kepemimpinan populis kepemimpinan demokratis, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan demokratis --- adapun, model kepemimpinan pelayan (servant leadership) dan kepemimpinan horisontal (horisontal leadership) adalah yang paling menonjol dari kelimanya.

Kata Kunci: Joko Widodo, blusukan, kepemimpinan.

Pendahuluan

Kehadiran Joko Widodo (Jokowi) dalam dunia politik Indonesia dianggap oleh beberapa pihak sebagai sesuatu yang fenomenal. Joko Widodo memulai karir politiknya sebagai Walikota Solo (2005), kemudian terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012). Dari tiga proses pilkada yang telah dilewati baik di Solo sebanyak dua kali (2005 dan 2010), maupun di DKI satu kali (2012),

serta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, telah berhasil menjadikannya sebagai pemenang. Joko Widodo mampu menjadi presiden disaat usia politiknya masih sangat muda, yakni 9 tahun (2005-2014).

Menurut Eep Saefullah (2012, hal 113), sungguh menyakitkan mendapatkan fakta bahwa Joko Widodo menjadi fenomenal karena ia melakukan apa yang memang semestinya dilaku-

kannya sebagai seorang kepala daerah. Selanjutnya, hal ini menyakitkan karena mengandung makna bahwa umumnya kepala daerah lain tidak melakukan yang semestinya mereka lakukan. Laporan dari Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto; selama sepuluh tahun terakhir, kepala daerah menjadi tokoh yang paling banyak tersangkut korupsi, yakni “Gubernur 20 kasus, Wakil Gubernur tujuh kasus, Bupati 156 kasus, Wakil Bupati 46 kasus, Wali Kota 41 kasus dan Wakil Wali Kota 20 kasus (Meilikah, <http://microsite.metrotvnews.com>, diakses pada 12 September 2014). Tertangkapnya 290 kepala daerah tersebut mempertegas ucapan Eep, bahwa banyak kepala daerah yang bukan hanya tidak menjalankan amanat rakyat, akan tetapi, telah mengkhianatinya.

Joko Widodo dikenal menyandang beberapa julukan, di antaranya, “*the street democracy*” (Muhammad Hasits, <http://www.merdeka.com>, diakses tanggal 18 Maret 2015). Sebutan tersebut muncul karena Jokowi lebih banyak menggunakan waktu di jalan melalui *blusukan*-nya. Jokowi berkeliling bertemu dengan rakyat, mendengar segala macam harapan dan gugatan rakyat.

Kemudian, semua *input* tersebut diolah menjadi *output*. Julukan lain Jokowi adalah Obama dari Jakarta (Muhammad Hasits, <http://www.merdeka.com>, diakses pada 18 Maret 2015).

Kantor Berita Inggris BBC menyebut Jokowi sebagai Obama dari Jakarta. Artikel itu dimuat dalam BBC Asia, Rabu (23/1). Judulnya *Flooding tests Jakarta's*. Selanjutnya Jokowi diberi predikat sebagai “*Mr Fix*” dari majalah The Economist edisi Asia (Muhammad Hasits, <http://www.merdeka.com>, diakses pada 18 Maret 2015).

Maknanya cukup luas, bisa memperbaiki atau merapikan. Jokowi juga memperoleh label sebagai “*The man in the Madras Shirt*” dari majalah terkemuka, TIME. Identitas tersebut muncul karena Jokowi dianggap sukses menggunakan baju kotak-kotak saat kampanye dalam Pilgub Jakarta (Muhammad Hasits, <http://www.merdeka.com>, diakses pada 18 Maret 2015).

The New York Times menyoroti gaya blusukan Jokowi dengan memberikan judul; “*Jokowi, a Governor at Home on the Streets*” (Joe Cochrane, <http://www.nytimes.com>, diakses tanggal 5 Februari 2016). Istilah tersebut lahir karena sering-

nya Joko Widodo berkeliling ke kawasan kumuh, pasar tradisional, dan tempat lainnya. Identitas lain Joko Widodo adalah *man of the people* (Joe Cochrane, <http://www.nytimes.com>, diakses pada 5 Februari 2016) karena dianggap sebagai politisi bersih. Ia juga dinilai sukses membereskan PKL Tanah Abang dan menormalisasi Waduk Pluit.

Model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka blusukan juga menuai beberapa kritik. Sebagian pihak menganggap blusukan tersebut hanya strategi pencitraan Joko Widodo agar dianggap dekat dengan rakyat.

Menurut Igo Ilham, anggota DPRD DKI Komisi E, waktu dan energi Joko Widodo bisa habis hanya untuk blusukan. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Joko Widodo menularkan kebiasaan itu kepada pejabat wilayah. “Seharusnya itu dilakukan oleh pion-pion pemda, yaitu lurah, camat, dan suku dinas”. (Atmi Pertiwi, <http://www.tempo.co>, diakses 11 September 2014).

Terkait kritik tersebut, pada beberapa kesempatan, Joko Widodo menjelaskan bahwa turun ke lapangan bukan berarti hanya menemui warga serta melihat kondisi perkampungan kumuh, akan tetapi, juga untuk mengontrol lapangan, memantau pelaksanaan proyek dan program kerja.

Terkait isu pencitraan, Sri Kadarwati menjelaskan bahwa Joko Widodo tidak masuk kategori pencitraan. Karena apa yang dilakukan terbukti semuanya. “Kan terbukti semua. Semua ada tindak lanjutnya. Kalau pencitraan kan tidak ada tindak lanjutnya. Ini kan ada solusinya. Ada jalan keluarnya” (Wawancara dengan Sri Kadarwati pada Jumat, 29 Mei 2015 di Solo).

Sri mencontohkan, ketika ada isu bahwa Kasatpol PP seorang perempuan adalah bentuk pencitraan. Menurutnya, ketika ia mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka, itu bukan pencitraan.

Model kepemimpinan Joko Widodo dengan pendekatan blusukan telah menjadi antitesis, sekaligus kritik terhadap model kepemimpinan dominasi politik saat ini yang lambat, birokratis, dan sangat berjarak dengan rakyat. Selanjutnya, blusukan telah menjadi istilah baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini.

Dari hal tersebut, maka, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan teori kekuasaan.

Model Kepemimpin Politik Joko Widodo

Latar belakang Joko Widodo bukanlah mantan aktivis kampus, seperti aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), maupun aktivis organ eksternal seperti GMNI, HMI, PMKRI dan lainnya. Ia hanya alumni Fakultas Kehutanan UGM. Jurusan yang tidak terkait dengan tema politik dan kepemimpinan yang kemudian menjadi jalan hidupnya. Menurut Akbaruddin Arif, Joko Widodo belajar kepemimpinan dan politik secara otodidak. Ia belajar dengan model *learning by doing* (Wawancara dengan Akbaruddin Arif pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, di Solo). Joko Widodo belajar tentang kepemimpinan dan politik dari interaksinya dengan berbagai elemen masyarakat, LSM, kampus, birokrasi, sesama politisi dan lainnya. Selanjutnya, ia belajar kepemimpinan pada organisasi yang ia pimpin, seperti ASMINDO dan Kadin Solo.

1. Model Kepemimpinan Pelayan (*Model of Servant Leadership*)

Kepemimpinan pelayan merupakan ciri yang paling menonjol dari model kepemimpinan politik Joko Widodo. Hal tersebut terlihat dari biografi politiknya yang berangkat dari ketua pengrajin mebel (ASMINDO) dan KADIN Solo. Jabatan tersebut diperolehnya setelah lama memberikan perhatian dan pelayanan kepada para pengrajin agar mereka juga dapat menembus pasar Eropa sebagaimana yang ia lakukan. Oleh sebab itu, pada saat momentum Pilkada Solo 2005, temannya para pengrajin mebel yang ada di ASMINDO serta KADIN mendorong Joko Widodo untuk ikut mencalonkan diri.

Robert Greenleaf dalam Pasolong (2008, hal.65.) menjelaskan; kepemimpinan pelayan adalah suatu model kepemimpinan yang berangkat dari perasaan yang tulus hanya untuk melayani, dengan memastikan bahwa kebutuhan pihak lain dapat dipenuhi dengan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lebih dewasa, bebas, sehat dan otonom, yang suatu saat akan menjadi pemimpin pelayan selanjutnya. Semangat Joko Widodo untuk selalu berbagi motivasi berbisnis mebel kepada para pengrajin dan pengusaha mebel lain yang ada di Solo membuatnya diminta untuk membuat dan kemudian memimpin organisasi pengrajin mebel (ASMINDO). Selanjutnya,

keberhasilannya meningkatkan kualitas hidup para pengrajin mebel di SOLO melalui ASIMDO menjadikan Joko Widodo semakin populer. Saat 2005, ketika ada momen pilkada, akhirnya para anggota ASMINDO bersepakat untuk mendorong Joko Widodo sebagai kandidat walikota. Semua itu karena kesuksesannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang dipimpinnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Spears dalam Pasolong (2008, hal.65); perbedaan mendasar antara model kepemimpinan pelayan dengan model kepemimpinan yang lain adalah keinginan untuk melayani ada sebelum adanya keinginan untuk memimpin, makanya, mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin karena cara tersebut yang dianggap paling efektif untuk melayani. Dengan kata lain, seseorang terpilih menjadi pemimpin karena diminta oleh pengikutnya (Pasolong. 2008, hal.65).

Berkait dengan yang tersebut di atas, pemimpin pelayan menjadikannya melayani sebagai visi hidup untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Oleh sebab itu, orang yang demikian diminta oleh pengikutnya untuk menjadi pemimpin (Pasolong. 2008, hal.65). Pengalaman Joni Hari Sumantri (wawancara dengan Joni Hari Sumantri pada Rabu, 27 Mei 2015, di Solo) dalam membantu kerja Joko Widodo, selama tidak melanggar aturan, ia tidak pernah merasa dipersulit dengan hal yang bersifat prosedural. Joko Widodo meyakini, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secepat mungkin. Jadi, prinsipnya, lebih cepat lebih baik --- contohnya, Joko Widodo bisa ditemui oleh bawahannya di manapun untuk minta tanda tangan, termasuk, kadang, di pinggir jalan.

Menurut Ahmad Zulkifli (2012, hal 8), dalam servant leadership, kepemimpinan bukan merupakan posisi ketika seorang pemimpin duduk menikmati penghormatan, penghargaan, sanjungan dari umat atau bawahannya, akan tetapi, suatu posisi ketika seseorang harus selalu siap untuk berada di posisi paling rendah dan paling belakang. Pemimpin yang melayani harus bersedia kehilangan 'hidupnya' ataupun hak-hak istimewanya demi tercapainya kesejahteraan hidup orang-orang yang dipimpinnya, dan bukan sebaliknya, justru mengambil hak-hak, atau memeras tenaga bawahannya demi kesejahteraan hidup sang pemimpin. Dwi Laksana Sadi (dalam wa-

wawancara yang dilakukan pada Jumat, 29 Desember 2015, di Jakarta) menceritakan; kesejahteraan Kepala Rukun Tetangga (RT) di Jakarta jauh meningkat di era Joko Widodo. Sebelumnya hanya bisa mendapatkan Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu sebulan, setelah Joko Widodo menjadi gubernur, Kepala RT mendapatkan Rp 1 juta perbulan. “Kesejahteraan RT zaman Pak Jokowi sebesar Rp 975 ribu, atau satu juta setelah potong pajak, sedang waktu Pak Fauzi Bowo hanya sekitar 200-300 [ribu rupiah] perbulan”.

Selanjutnya, ciri kepemimpinan pelayan yang dibahas Spears dalam Pasolong (2008, hal.65) adalah keinginan untuk melayani telah ada sebelum adanya keinginan untuk memimpin, jadi, melayani merupakan visi hidup untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, orang yang demikian diminta oleh pengikutnya untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, Joko Widodo menjadi pemimpin pelayan dengan mulai melayani temannya sesama pengrajin mebel agar mereka juga bisa tembus ke pasar Eropa, kemudian, menjadi pelayan rakyat secara lebih luas setelah terpilih dalam Pilkada Solo 2005. Joko Widodo berbeda dengan Soekarno yang menjadi pemimpin pelayan dengan melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Soekarno mendirikan sekolah rakyat, organisasi perjuangan dan juga partai politik untuk membangun kesadaran rakyat tentang pentingnya persatuan dan keberanian untuk bisa lepas dari penjajahan. Atas sikapnya tersebut, Soekarno muda memulai hidupnya dengan keluar masuk penjara.

Sementara, Joko Widodo menjadi pemimpin pelayan dengan senantiasa mendatangi warga. Ia masuk kantor hanya sebentar, sisanya dihabiskan di jalan, pemukiman kumuh, terminal, pasar dan titik kaum miskin yang lain. Di mobilnya selalu disiapkan hadiah untuk kaum miskin yang ditemuinya, di antaranya beras, gula, buku, dan sebagainya. Ia juga menghilangkan hambatan prosedural dan birokratis yang membatasi warga bertemu pemimpinnya.

2. Model Kepemimpinan Horisontal (*Model of Horizontal Leadership*)

Selain kepemimpinan pelayan yang menonjol dalam kepemimpinan Joko Widodo, kepemimpinan model horisontal juga terlihat cukup

dominan. Hal tersebut tampak dari kemampuannya dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya, serta model kepemimpinannya yang tidak mengandalkan titel dan jabatan. Joko Widodo merupakan pemimpin yang merakyat, informal, dan tidak suka dengan hal yang terlalu birokratis. Selanjutnya, *blusukan* merupakan cara Joko Widodo untuk memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Dengan metode tersebut, ia senantiasa menyempatkan diri untuk mendatangi warga yang telah memberikan mandat saat pilkada.

Charles H. Green (<http://trustedadvisor.com>, diakses pada 18 Maret 2015) menjelaskan kepemimpinan horisontal merupakan kebalikan dari kepemimpinan vertikal yang dijalankan seperti komando dan kontrol yang sebagian besar berlaku dengan satu cara dari atas ke bawah. Menurut, Yasraf A. Piliang (dalam wawancara yang dilakukan pada 9 Mei 2014 di Bandung), Joko Widodo telah menggerogoti sistem hirarkis dari dalam. Ia hidup dalam sistem hirarkis, misalnya sebagai Gubernur DKI, disiapkan baju yang formal, mobil dinas, ajudan, satpol PP. Semua perangkat itu sebagai penanda bahwa ia adalah orang yang punya kekuasaan. Sesuai aturan, maka, sebagai pejabat, ia diminta menggunakan semua perangkat serta kekuasaan yang hirarkis sebagaimana yang dilakukan oleh para gubernur sebelumnya.

Kepemimpinan horisontal yang dipraktikkan melalui kepercayaan sebagaimana Green, (<http://trustedadvisor.com>, diakses pada 18 Maret 2015), juga diterapkan oleh Joko Widodo yang meyakini bahwa kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Kemampuannya dalam menjaga kepercayaan tersebut membuat ia diamanahi oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung untuk menjabat sebagai Walikota Solo selama dua periode dan Gubernur DKI selama dua tahun, kemudian diamanahi menjadi Presiden.

“Membangun kepercayaan, membangun reputasi, tak bisa sehari dua hari ... karena dengan kepercayaan itulah kita bisa membangun ke tempat berikutnya. Namun, (kepercayaan) itu bisa runtuh dalam sekejap karena sesuatu hal yang dilakukan” (HAR, Kompas, 19 November 2015, hal 2).

Stephen J. Sampson dalam Ridwansyah

(2013, hal 28-29) memaparkan, aspek *intellectuality* dalam kepemimpinan horisontal bukan hanya sekadar masalah nilai IQ, akan tetapi, juga terkait dengan kemampuan untuk mengelola cara berpikir sehingga bisa memberikan pengaruh yang lebih efektif pada orang lain. Aspek intelektual Joko Widodo terlihat sejak kecil, ketika SD ia mampu menjadi juara satu, begitupun saat SMP dan SMA menjadi juara umum sekolah. Kemudian, pasca lulus SMA pada 1980, ia melanjutkan kuliah di Jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Suatu prestasi yang luar biasa, karena saat itu sangat sulit lolos tes di UGM.

Dalam padangan Joko Widodo, siapapun pemimpin yang masih elitis pasti akan jatuh. Setiap pemimpin harus memiliki kedekatan dengan masyarakat serta mampu mengerti keinginannya. Itulah kepemimpinan di era horisontal.

“Pada era horisontal, semua harus berpulang kepada masyarakat. Kita harus ngerti keinginan masyarakat. Kita harus ngerti bagaimana memberi kepuasan kepada masyarakat ... kalau kita gak ngerti masalah, problem, dan persoalan mereka, bagaimana kita bisa mendeliver program-program kerja untuk mereka. Nggak mungkin kena, gak mungkin pas. Pergaulannya gubernur hanya dengan menteri, walikota, gak mungkin ngerti kebutuhan-kebutuhan masyarakat ... <https://www.youtube.com/watch?v=jqEYZbhmYfi>, (diakses pada 2 Me 2015)”.

Selaras dengan yang tersebut di atas, Joko Widodo dan Abdurrahman Wahid menerapkan model kepemimpinan horisontal, yakni seni memimpin tanpa mengandalkan titel dan jabatan (Ridwansyah, 2013. hal 29). Model kepemimpinan merakyat, informal, dan tidak suka dengan hal yang terlalu birokratis terlihat dalam sosok Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden dengan mengubah wajah istana negara yang sebelumnya dianggap sakral dengan membuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Kebijakan tersebut membuat jumlah wartawan di istana negara melonjak drastis, yang sebelumnya kurang dari 100 meningkat jadi 800-an (Wahyu Muryadi, <http://tempointeraktif.com>, diakses pada 8 Februari 2016). Jumlah wartawan dan tamu yang banyak itu membuat istana seperti “pasar malam”.

Selain sikapnya yang tidak terlalu kaku

dengan protokoler kepresidenan, *ceplas-ceplos*-nya juga merupakan khas rakyat kecil yang tidak terlalu kaku dalam menyampaikan suatu pesan. Begitupun ketika Joko Widodo menjadi kepala daerah, ia membuka rumah jabatannya untuk masyarakat luas. Ia bahkan tidak hanya menunggu didatangi, akan tetapi, justru berupaya mendatangi warganya dengan blusukan. Joko Widodo menjadikan blusukan sebagai media untuk belanja masalah. Dari berbagai info dan masukan yang diterimanya digunakan untuk merumuskan kebijakan. Sebagaimana salah satu prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, maka, blusukan merupakan metode untuk mewujudkan prinsip tersebut.

3. Model Kepemimpinan Populis (*Model of Populist Leadership*)

Selain kepemimpinan pelayan dan horisontal yang mencolok, model kepemimpinan populis Joko Widodo juga cukup kuat. Joko Widodo merupakan pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat menjadi bagian dari kepemimpinannya. Ia muncul sebagai orang biasa dengan atribut yang luar biasa. Joko Widodo mampu menjadikan nilai-nilai yang hidup di tengah rakyat sebagai landasan gerakannya. Salah satunya dalam menata kota, ia menerapkan prinsip Jawa, *nguwongke uwong* (memanusiakan manusia). Kesuksesannya merelokasi PKL di Taman Banjarsari Solo, Waduk Pluit Jakarta, dan tempat lainnya merupakan bukti keberhasilan pendekatan tersebut. Selanjutnya, blusukan merupakan metode yang Joko Widodo gunakan agar ia senantiasa berada di tengah rakyat. Dengan blusukan, ia dapat mendengar dan memahami berbagai keluhan rakyatnya serta memantau perkembangan kinerja bawahannya.

Selanjutnya, menurut Gatot Suradji, Engelbertus Martono (2014, hal 108) pemimpin populis adalah pemimpin yang mampu membangkitkan solidaritas rakyat dengan menjadikan nilai-nilai yang hidup di tengah rakyat sebagai landasan gerakan, yang kemudian diarahkan kepada nasionalisme. Salah satu momen yang menaikkan nama Joko Widodo dalam kancah politik Indonesia adalah kesuksesannya merelokasi 989 orang PKL yang berdagang di Monumen Banjarsari, ke Pasar Klithikan Notoharjo, Solo, dengan mengajak makan perwakilan mereka hingga 54

kali. Saat itu, cara yang dilakukan Joko Widodo adalah *nguwongke uwong* (memanusiakan manusia), salah satu konsep penataan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Dengan prinsip *nguwongke uwong*, Joko Widodo berhasil mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun kota dan selanjutnya untuk tetap menjaga tradisi yang ada sekaligus memperkuat brand Solo sebagai "*The Soul of Java*". Selain itu, secara rutin, ia juga mengadakan Solo Keroncong Festival, Solo Batik Festival, dan lain sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh Edward Shils dalam Gunawan Wiradi (www.sajogyo-institute.or.id, diakses pada 8 Maret 2015), populisme adalah kehendak rakyat dan merupakan yang tertinggi di atas semua standar yang lain. Hal tersebut juga dilakukan oleh Joko Widodo, sebagaimana yang dicontohkan oleh Eko Sulistyio terkait kasus pemindahan masyarakat di daerah Waduk Pluit. Pada saat *blusukan*, Joko Widodo mendapat info dari masyarakat bahwa mereka akan segera di-pindahkan oleh dinas terkait, padahal, rusun sebagai tempat baru mereka belum jadi. Atas laporan tersebut, kemudian, Joko Widodo memerintahkan bawahannya untuk menunda relokasi sampai rusun benar-benar siap.

Sebagaimana yang dipaparkan Panizza dalam Anders Hellström bahwa pemimpin populis adalah pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat menjadi bagian dari kepemimpinannya. Menurut Eko Sulistyio (dalam wawancara pada Senin, 18 Mei 2015, di Jakarta) ia muncul sebagai orang biasa dengan atribut yang luar biasa. Joko Widodo dan Soekarno sama-sama orang biasa yang kemudian menjadi pemimpin populis. Soekarno dalam Cindy Adams mengatakan bahwa ia lahir di tengah kemelaratan yang sangat parah. "Aku dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemiskinan. Aku tidak mempunyai sepatu. Aku mandi tidak dalam air yang keluar dari kran. Aku tidak mengenal sendok dan garpu." (Hellström, 2013. Hal 9).

Hal tersebut selaras dengan Joko Widodo kecil yang besar dengan penuh derita. Ia dan keluarganya dipandang rendah oleh orang lain karena hidupnya tidak terlepas dari satu penggusuran ke penggusuran yang lain. Derita itulah yang kemudian mendidik dua manusia tersebut untuk memahami betul hakikat derita rakyat dan negerinya.

Joko Widodo dan Soekarno sama-sama mengimplementasikan kepemimpinan populis. Soekarno mampu menjadikan nilai-nilai yang hidup di tengah rakyat sebagai landasan gerakan dan kemudian diarahkan kepada nasionalisme. Soekarno telah menjadi pemimpin rakyat untuk mengusir penjajah dan kemudian masuk dalam gerbang kemerdekaan. Dalam pidato-pidatonya dengan retorika anti-imperialis yang populis, ia mendorong rakyat untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan slogan Trisaksi, yakni berkeadilan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Soekarno menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat kemudian memformulasikannya menjadi ideologi negara, yaitu Pancasila.

Model kepemimpinan populis Joko Widodo tidak dilalui dengan konfrontasi langsung terhadap imperialisme. Ia berkuasa setelah 60 tahun kemerdekaan yang diproklaimirkan oleh Soekarno. Joko Widodo tidak pandai berbicara tentang ideologi besar, ia juga tidak memperlihatkan keberpihakan secara terbuka pada sikap anti-asing atau pro-asing, maupun pro-rakyat kecil atau pro-investor. Ia senantiasa mengambil kebijakan yang dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.

Di Solo, Joko Widodo menghentikan izin baru untuk pendirian mal untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional. Di sisi lain, ia aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama para pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel karena targetnya menjadikan Solo sebagai kota MICE, *Meetings* (pertemuan), *Incentives* (insentif), *Conferencing* (konferensi), dan *Exhibitions* (pameran). Joko Widodo meyakini, lewat konsep MICE, maka, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Solo akan cepat tercapai. Joko Widodo menjadi populis karena mampu menghadirkan kebijakan yang juga menguntungkan rakyat kecil. Kepada Satpol PP, ia selalu menekankan agar mengutamakan pendekatan humanis dalam bertugas.

"Yang penting itu cara pendekatannya. Pendekatan yang saudara-saudara lakukan dalam hal menjaga ketertiban, keamanan di masyarakat jangan sampai ada lagi yang menggunakan kekerasan fisik ... Satpol PP merupakan cerminan dan watak dari pemerintah daerah. Apabila Satpol

PP memiliki wibawa, pemdanya juga memiliki wibawa. Kalau kasar, pemdanya juga dipersepsikan kasar (Indra Akuntono, <http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 9 Oktober 2014)”.

4. Model Kepemimpinan Kharismatik (*Model of Charismatic Leadership*)

Selain kepemimpinan pelayan, horison-tal dan populis yang berpengaruh secara signifikan dalam kepemimpinan Joko Widodo, model kepemimpinan kharismatiknya juga cukup kuat. Kharismanya diperoleh atas pengabdianya terhadap masyarakat dan kemampuannya dalam memberikan keteladanan. Ia selalu mencontohkan kesederhanaan kepada bawahan dan masyarakat. Meski merupakan Gubernur di Ibu Kota Negara yang memiliki pendapatan 72 triliun rupiah pertahun, ia tetap menjalani aktivitasnya dengan kendaraan dinas sederhana bermerek Innova. Hal tersebut sangat kontras dengan kepala daerah lain yang pendapatan daerahnya hanya beberapa miliar rupiah. Tidak hanya itu, Joko Widodo juga mematahkan hal-hal terdahulu dengan menciptakan hal-hal baru, di antaranya penerapan sistem lelang jabatan, paradigma humanis Satpol PP, serta transparansi anggaran sampai di tingkat kelurahan.

Pasolong (2008, hal 92) menjelaskan, dalam memaknai pemimpin kharismatik kita tidak bisa dilepaskan dari kata kharisma yang berasal dari kata Yunani yang berarti; “Karunia dari Ilahi”. Menurut Fery Setyawan (dalam wawancara pada Jumat, Mei 2015 di Solo), Joko Widodo merupakan karunia Ilahi. Ia berbeda jauh dengan politisi umumnya. Joko Widodo merupakan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Ia mencontohkan, PDIP yang bisa selamat dari konflik internal dibanding partai besar lain, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), karena hadirnya figur Joko Widodo sebagai magnet dan spirit baru.

“Klo istilah orang Jawa ada Satrio Pinigtit. Ya itulah Jokowi ... kalau di PDIP gak ada Pak Jokowi, hancurlah PDIP. Iya gak ... seandainya Jokowi gak dicalonkan presiden. PDI masih utuh gak. Padahal PPP hancur, Golkar hancur”. (Wawancara dengan Fery Setyawan, pada Jumat, 29 Mei 2015 di Solo).

Menurut Jhonny Simanjuntak, dalam suatu

wawancara pada Selasa, 7 Juli 2015 di Jakarta, ada yang tidak lazim dari perilaku Joko Widodo. Ia mencontohkan, nabi yang membawa sesuatu yang baru. Ketika berbeda dengan kebanyakan orang, maka, ia dianggap gila. Jhonny memaparkan bahwa kehadiran Joko Widodo dalam dunia politik di Indonesia mengoreksi sesuatu yang selama ini buruk tanpa menggunakan kata-kata, namun dengan tingkah laku. Misalnya tidak mau terima uang, tidak suka kampanye yang ramai-ramai.

“Perilaku Jokowi adalah perilaku tidak lazim. Nabi membawa sesuatu yang baru. Ketika berbeda dengan kebanyakan orang, maka, ia dianggap gila, dll ... kehadiran Jokowi mengoreksi suasana selama ini tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan tingkah laku. Misalnya tidak mau menerima uang, tidak suka kampanye yang rame-rame ... bahkan lelang jabatan...”

Sebagaimana kita ketahui, pemimpin kharismatik memimpin tidak dengan cara-cara yang lazim diharapkan dari peraturan yang telah dikenal. Tipe ini mematahkan hal-hal yang terdahulu, menciptakan hal-hal baru yang bersifat revolusioner (Kartodirdjo. 1984, hal 167). Salah satu hal cukup fenomenal yang diciptakan Joko Widodo adalah penerapan sistem lelang jabatan. Taufiqurrahman, (dalam suatu wawancara, Senin, 14 September 2015 di Jakarta), mengkritik sistem lelang jabatan yang diterapkan Joko Widodo di Jakarta. Menurutnya, itu keputusan fatal yang merusak tatanan birokrasi. Lelang jabatan telah menimbulkan keresahan dan membuat PNS tidak nyaman bekerja. Bagi Taufiqurrahman, klaim bahwa lelang jabatan merupakan reformasi birokrasi yang paling baik merupakan omong kosong, karena tidak ada yang bisa menjadi parameter, sebab sistem tersebut baru terjadi di republik ini.

Di sisi lain, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto (Reza Gunadha, <http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 6 Desember 2015), menilai kebijakan Joko Widodo untuk menerapkan sistem lelang jabatan merupakan langkah tepat untuk memutus rantai nepotisme dalam pengisian jabatan. Lelang jabatan merupakan terobosan dalam membongkar paradigma lama birokrasi. Hal tersebut mengartikulasikan Jokowi sebagai pemimpin yang visioner. Lelang jabatan adalah upaya nyata untuk membangun meritokrasi sistem, karena para pemimpin

dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuannya. Dengan sistem rekrutmen terbuka, maka, pengisian jabatan tidak lagi berdasarkan suka tidak suka di kalangan pimpinan.

Taufiqurrahman (dalam suatu wawancara, Senin, 14 September 2015 di Jakarta), menilai kinerja Joko Widodo saat menjadi gubernur, biasa-biasa saja, tidak banyak perubahan yang signifikan. Pada dasarnya, Joko Widodo hanya meneruskan apa yang sudah diprogramkan oleh gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo dengan mengganti nama, sehingga seolah-olah itu merupakan produknya, padahal bukan. Contohnya, program Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang pada saat Fauzi Bowo dinamakan beasiswa rawan bagi siswa miskin --- selanjutnya program Jakarta Sehat (KJS) yang waktu Fauzi Bowo dikenal dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Menurut Taufiqurrahman, Joko Widodo cenderung hanya memanfaatkan program-program pemerintah yang ada untuk pencitraannya.

Sejatinya, Joko Widodo dan Megawati sama-sama menerapkan model kepemimpinan kharismatik, namun sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya terkait penelitian Hadi Mustafa (2011, hal i.), yang berjudul *Kepemimpinan Kharismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDIP*, didapat simpulan bahwa faktor yang membuat Megawati menjadi pemimpin kharismatik di dalam PDIP, diantaranya karena faktor trah Bung Karno, sistem kepartaian yang sentralistik dan monoloyalitas kepada figur sentral, Megawati. Sebagaimana penjelasan Salim Said (Aris Danu, <http://m.inilah.com>, diakses pada 6 Februari 2016) bahwa Megawati merupakan penerus kharisma Soekarno.

Berkait dengan yang tersebut di atas, kharismatik Joko Widodo tidak didapatkan dari garis orang tua sebagaimana Megawati yang merupakan putra sang proklamator dan menjadi inspirasi bukan hanya di Indonesia, akan tetapi, juga dunia. Ayah Joko Widodo hanyalah tukang kayu yang rumahnya beberapa kali digusur pemerintah. Adapun di PDIP Solo, ayahnya hanyalah sebagai mantan satuan tugas (satgas) partai (Wawancara dengan YF Sukasno, pada Minggu, 24 Mei 2015 di Solo). Kharismanya ia peroleh atas pengabdian dirinya terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau suatu sifat yang patut dicontoh, sebagaimana

yang dijelaskan oleh Marx Weber dalam Ann Ruth Willner dan Dorothy Willner (Kartodirdjo, 1984, hal 166). Hal tersebut selaras dengan penjelasan Kukuh Hadisantoso sebelumnya (Wawancara dengan Kukuh Hadisantoso, pada Jumat, 16 Oktober 2015 di Jakarta), jika sepatu Joko Widodo yang seorang gubernur harganya Rp. 400.000,- sedang ia sebagai Kepala Satpol PP Rp. 2.000.000,- sudah barang tentu akan merasa malu. Oleh sebab itu, ia harus menyesuaikan dengan pimpinannya. Dengan kata lain, ketika pemimpin memperlihatkan kesederhanaan, maka, bawahan tidak berani memperlihatkan kemewahan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Gatot Subagyo (Wawancara dengan Gatot Subagio, pada Rabu, 20 Mei 2015 di Solo), Joko Widodo hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan teladan. Gatot membandingkan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang suka mengeluh, sementara, Joko Widodo mampu memberikan rasa optimisme atas krisis keteladanan terhadap pemimpin yang sedang melanda negeri ini.

Joko Widodo juga menjadi pemimpin kharismatik karena memimpin tidak dengan cara-cara yang lazim dengan menciptakan hal-hal baru (Kartodirdjo, 1984. hal 167), seperti penerapan sistem lelang jabatan, transparansi anggaran dengan menempel lembaran APBD di tiap kelurahan di Jakarta. Di sini, Joko Widodo hadir dalam dunia politik untuk menjawab kejenuhan publik atas politik yang elitis, monoton dan penuh kepalsuan. Ia rajin blusukan untuk mendengar, melihat dan menyentuh langsung rakyatnya dan kerap membuat keputusan yang didasari atas hasil blusukannya.

5. Model Kepemimpinan Demokratis (*Model of Democratic Leadership*)

Selain kepemimpinan pelayan, horisontal, populis dan kharismatik, Joko Widodo juga menerapkan model kepemimpinan demokratis dengan selalu menekankan pendekatan partisipatif dalam menjalankan kekuasaannya. *Blusukan* adalah merupakan cara Joko Widodo untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota sekaligus pengejawantahan dari demokrasi sejati, karena, setiap saat rakyat dihadirkan dalam politik. Bukan hanya pada saat pemilu berlangsung.

Siagian dalam Alfian (2009, hal 205-206.)

menjelaskan, model kepemimpinan demokratis selalu meyakini bahwa dana yang banyak akan sia-sia jika tidak digunakan oleh manusia demi mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pemimpin demokratis selalu memperhatikan kesejahteraan bawahan. Dalam penilaian Joni Hari Sumantri (pada suatu wawancara pada Rabu, 27 Mei 2015, di Solo), Joko Widodo termasuk pemimpin yang selalu memberi perhatian kepada para PNS. Ia selalu berupaya agar ada kenaikan gaji yang pantas kepada para PNS yang telah bekerja dan melayani masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Ralph White dan Ronald Lippit dalam Pasolong (2008, hal 47), model kepemimpinan demokratis disebut juga dengan model kepemimpinan partisipatif yang selalu mempergunakan pengetahuan para anggota dalam membuat suatu keputusan. Menurut Indah (dalam suatu wawancara, pada Rabu, 27 Mei 2015 di Solo), Joko Widodo selalu melibatkan partisipasi wartawan sebelum mengambil keputusan tertentu, termasuk menentukan lokasi blusukan. Indah mencontohkan, ketika Joko Widodo akan menikahkan anaknya, ia bahkan mengajak wartawan Solo untuk makan bersama sekaligus menanyakan bagaimana bentuk acara yang diharapkan oleh teman-teman wartawan. Joko Widodo paham, wartawan ingin memberitakan acara pernikahan anaknya --- oleh sebab itu, ia meminta konsep acara yang bagus sehingga wartawan juga mudah untuk meliputnya.

Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama menerapkan model kepemimpinan demokratis. Hanya SBY kadang berlebihan atau keliru dalam memaknai demokrasi. Atas sikapnya yang selalu menunggu banyak masukan sebelum mengambil keputusan, maka, beberapa pihak menganggapnya sebagai presiden yang selalu lamban dalam mengambil keputusan --- misalnya, perseteruan KPK dan Polri yang melibatkan komisioner KPK,

Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah serta Ketua KPK Antasari Azhar yang ditahan oleh Bareskrim Polri. Begitupun kasus ganti rugi korban lumpur Lapindo yang bertahun-tahun tanpa kejelasan.

Penerapan demokrasi oleh SBY yang dianggap kebablasan, tak heran, sempat muncul banyak spanduk di Jakarta yang bertuliskan “Negara Auto Pilot”. Effendi Gazali seorang master komu-

nikasi politik dari Universitas Indonesia menilai; ada banyak tafsir atas tulisan “Negara Auto Pilot”, seperti tidak dibangunnya infrastruktur, sampai membiarkan rakyat ditembak oleh aparat yang mengabdikan pada pengusaha atau investor, serta soal makin terasa kuatnya pengaruh neoliberalisme (Wahyu Aji, <http://www.tribunnews.com>, diakses 7 Februari 2016).

Istilah tersebut hadir karena adanya pemerintahan yang berjalan tanpa perlu ada pemimpin atau pengendalinya, misalnya, pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 % juga dinilai karena adanya gerakan dari pasar yang berjalan sendiri tanpa ada kawalan kebijakan dari pemerintah.

Sementara, Joko Widodo menerapkan kepemimpinan demokratis yang tidak kebablasan dengan senantiasa mengambil sikap tegas untuk melindungi rakyatnya, misalnya ia berani membuat aturan terkait lokasi dan jam operasional supermarket untuk memberi perlindungan kepada pedagang kecil. Ia juga tegas menolak izin baru untuk pendirian mal demi menjaga eksistensi pasar tradisional.

Hal lain yang membedakan kepemimpinan demokratis SBY dengan Joko Widodo adalah penerapan demokrasi Joko Widodo yang lebih substantif. Blusukan Joko Widodo merupakan bentuk dari demokrasi sejati, di sini rakyat dihadirkan dalam politik bukan hanya pada saat pemilu, namun, mereka dilibatkan pada setiap harinya. Hampir tidak ada kebijakan yang diputuskan tanpa terlebih dahulu mendengar masukan langsung dari rakyat. Atas sikapnya tersebut, ia dianggap menerapkan “demokrasi jalanan” karena langsung bertemu masyarakat. Ia lebih banyak berada di jalan, kampung kumuh, terminal, dan pasar-pasar daripada di kantor. Beberapa wartawan asing memberikan beberapa julukan kepadanya, seperti, “*the street democracy*”, “*Jokowi, a Governor at Home on the Streets*”, dan “*man of the people*”.

6. Kecenderungan Model Kepemimpinan Politik Joko Widodo

Di antara lima model kepemimpinan yang terkait dengan kepemimpinan Joko Widodo, ada dua model yang paling menonjol, yakni model kepemimpinan pelayan (*Servant Leadership*) dan kepemimpinan horisontal (*Horisontal Leadership*).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert Greenleaf dalam Pasolong (2008, Hal 59), kepemimpinan pelayan adalah suatu model kepemimpinan yang berangkat dari perasaan yang tulus untuk melayani dengan memastikan bahwa kebutuhan pihak lain dapat dipenuhi serta menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lebih dewasa, bebas, sehat dan otonom. Kepemimpinan pelayan merupakan model kepemimpinan yang sangat menonjol dalam diri Joko Widodo.

Selain kepemimpinan pelayan, model kepemimpinan horisontal juga sangat dominan. Joko Widodo memimpin tanpa mengandalkan titel dan jabatan. Ia merupakan pemimpin yang merakyat, informal, dan tidak suka dengan hal yang terlalu birokratis. *Blusukan* adalah merupakan metode yang dipilih Joko Widodo untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan tidak kaku kepada masyarakat yang telah memilihnya dalam proses pilkada. Joko Widodo menilai, saat ini, model kepemimpinan elitis tidak bisa lagi diterapkan. Setiap pemimpin harus memiliki kedekatan dengan masyarakat, serta mengerti keinginannya. Itulah kepemimpinan di era horisontal.

“Pada era horisontal, semua harus berpulang kepada masyarakat. Kita harus ngerti keinginan masyarakat. Kita harus ngerti bagaimana memberi kepuasan kepada masyarakat...Kalau kita gak ngerti masalah, problem dan persoalan mereka, bagaimana kita bisa mendeliver program-program kerja untuk mereka. Gak mungkin kena, gak mungkin pas. Gak mungkin kayak gubernur kayak dulu dengan pola-pola eksklusif. Pergaulannya gubernur hanya dengan menteri, walikota, oleh sebab itu, gak mungkin ngerti kebutuhan-kebutuhan masyarakat ... (Humas UII. <https://www.youtube.com/watch?v=jqEYZbhmYfI>, diakses 2 Me 2015).

Sebagaimana salah satu prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, maka, *blusukan* merupakan metode untuk mewujudkan prinsip tersebut. Model kepemimpinannya yang merakyat dan informal berhasil dengan kemampuannya memindahkan secara damai sekitar 1000 PKL di Taman Banjarsari, Solo, serta lebih 1600 penduduk miskin yang ada di sekitar Waduk Pluit Jakarta, dan beberapa lokasi penertiban lainnya.

Blusukan Dalam Kepemimpinan Politik Joko

Widodo

Blusukan berasal dari kata *blusuk* yang artinya masuk ke dalam (Mulyono. 2008, hal 40) *Blusak-blusuk* diartikan *mlebu ing ngendi-ngendi*, atau masuk kemana-mana, adapun imbuhan akhiran, pada kata *blusuk-an* bermakna masuk ke, yakni kegiatan memasuki suatu tempat yang asing, tak lazim, tak biasa untuk menemukan atau mencari sesuatu.

Meminjam Reza A.A Wattimena (<http://rumahfilsafat.com>. (diakses tanggal 18 Agustus 2014), politik *blusukan* adalah politik kritis yang menolak tunduk patuh pada data statistik ciptaan para birokrat, dan berusaha sendiri mencari apa yang terjadi di lapangan. Dengan politik *blusukan*, para pemimpin politik dapat mengecek langsung, apakah keputusan yang telah ia buat dijalankan dengan baik atau tidak. Dari sudut pandangan metode berpikir ilmiah, cara ini disebut juga verifikasi.

Saat menjadi pembicara pada kegiatan Seminar “Memimpin dengan Hati” di Universitas Islam Indonesia (UII), Joko Widodo mengkritik sikap elit politik yang tidak mau membaur dengan masyarakat bawah. Ia menjelaskan, konsep kepemimpinan yang diikuti sederhana, yakni rajin mengendus keluhan masyarakat dengan cara sering ke bawah.

“Sekarang ini era horizontal bukan vertikal. Rumus ini berlaku di pemerintahan maupun swasta (<https://www.youtube.com>, (diakses tanggal 2 Me 2015).

Pandangan lain diungkapkan oleh politisi DKI Jakarta, Taufiqurrahman (wawancara pada Senin, 14 September 2015 di Jakarta). *blusukan* merupakan strategi pencitraan Joko Widodo, karena banyak masalah yang tidak juga selesai pasca dilakukan *blusukan*. Bagi Taufiqurrahman, sebagai gubernur, Joko Widodo bisa memantau kondisi lapangan dengan menggunakan laptop. Jadi masalah bisa selesai di balik meja.

Taufiqurrahman tidak setuju dengan pekerjaan Joko Widodo sebagai gubernur yang turun ke masyarakat bagi-bagi Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar. Idealnya, itu cukup dilakukan oleh orang kelurahan, Ketua RT, Ketua RW serta puskesmas. Tugasnya gubernur adalah bagaimana caranya menyediakan ruang kamar bagi rakyat miskin sebanyak-banyaknya. Jadi ketika rakyat miskin mau berobat, kamarnya ada. Selanjutnya,

bagaimana caranya gubernur menambah tenaga kesehatan di puskesmas, rumah sakit supaya pasien benar-benar tertangani dengan baik.

Sementara, Radhar Panca Dahana (<http://lipsus.kompas.com>, diakses 19 Januari 2016) Joko Widodo tidak akan bisa berbuat secara maksimal dan bahkan tidak akan menjadi apa-apa tanpa blusukan. Kecerdasan tradisional Joko Widodo membutuhkan telinga, mata, hidung, dan lainnya untuk dapat menangkap substansi dari suatu masalah. Dengan turun ke lapangan dan bertemu masyarakat, saling menyapa dan berbagi cerita, maka, Joko Widodo akan mampu menangkap realitas sebenarnya. Mungkin tidak ada politisi di negeri ini yang tangannya paling banyak bersentuhan dengan tangan rakyat, selain Joko Widodo.

Implikasi *Blusukan* Terhadap Birokrasi

Dalam pandangan Eko Sulistyio (wawancara pada Senin, 18 Mei 2015 di Jakarta), dengan blusukan, Joko Widodo menjadi pemimpin yang tidak bisa dibohongi oleh bawahannya dan juga membuat para staf semakin disiplin dalam melayani masyarakat. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang suka terjun ke lapangan dan mengecek langsung segala laporan bawahan, maka, “ABS (Asal Bapak Senang)”. tidak lagi berlaku lagi.

Sebagaimana diketahui, “ABS” telah menjadi kebiasaan dalam birokrasi di negeri ini. Namun, blusukan mampu membuat bawahan harus selalu bekerja ekstra, karena apa yang dikerjakan selalu terpantau. Para SKPD juga tidak bisa melakukan sesuatu yang menyakiti masyarakat, karena suatu saat pasti masyarakat akan menyampaikannya ke Joko Widodo. Beberapa kali penulis mengikuti Joko Widodo di suatu acara di masyarakat, selalu ada yang memberikan kertas di saat bersalaman. Itu dilakukan ketika masyarakat tersebut tidak sempat menyampaikan langsung keluhan atau harapannya.

Gatot Subagyo (wawancara pada Rabu, 20 Mei 2015 di Solo). menilai bahwa blusukan Joko Widodo membuat kinerja birokrasi di bawah semakin baik. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin rajin dan tidak lagi suka keluyuran di saat jam kantor. Mereka takut jika tiba-tiba Walikota datang, sedangkan mereka sedang tidak berada di tempat. “Dampaknya mereka semakin rajin bekerja di kantor, gak sering keluyuran. Kalo dilapor-

in kan mereka takut. Sekarang kantor kelurahan bersih rapi kayak bank. Pelayanannya semakin sopan, semakin baik.”

Implikasi *Blusukan* Terhadap Masyarakat

Implikasi blusukan bagi masyarakat menurut Sri Kadarwati adalah telah memberi akses yang begitu luas kepada masyarakat untuk menyampaikan segala persoalannya. “Bagi masyarakat, kalo Pak Jokowi lewat bisa langsung menyampaikan, misalnya; “Pak jalannya ndak bagus(wawancara pada Jumat, 29 Mei 2015 di Solo)”. Meski ia juga menyayangkan, kadang ada oknum masyarakat yang melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ia mencontohkan, misalnya pembuatan KTP. Standar prosesnya satu jam, akan tetapi, karena ada data pendaftar yang kurang, maka, prosesnya jadi lebih lama. Pada kasus tersebut, masalah bukan pada birokrasi, namun, oknum masyarakat yang tidak melengkapi berkasnya.

Eko Sulistyio (dalam wawancara pada Senin, 18 Mei 2015 di Jakarta), memaparkan bahwa blusukan memberi manfaat yang sangat besar, di antaranya, masyarakat bisa lebih komunikatif dengan pemimpinnya karena bisa ikut menentukan atau mempengaruhi kebijakan yang terbaik bagi mereka. Dengan sistem tersebut, maka, suatu kebijakan betul-betul bisa memuaskan masyarakat. Eko Sulistyio mencontohkan kasus pemindahan masyarakat di kawasan Waduk Pluit. Pada saat blusukan, Joko Widodo mendapat info dari masyarakat bahwa mereka akan segera dipindahkan oleh dinas terkait, padahal rusun sebagai tempat baru mereka belum jadi. Atas laporan masyarakat tersebut, Joko Widodo kemudian memerintahkan bawahannya untuk menunda relokasi sampai rusun benar-benar siap.

Implikasi *Blusukan* Terhadap Elektabilitas

Menurut Akbaruddin Arif (wawancara pada Senin, 25 Mei 2015, di Solo), Joko Widodo blusukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang dilakukannya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu persoalan di sebagian daerah adalah ketika kebijakan pembangunan hanya berbasis pada proyek yang menguntungkan segelintir pihak, bukan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka, akan tercipta kemakmuran. Hal tersebut akan memberi implikasi

positif pada Pilkada selanjutnya.

“Kebijakan yang tepat akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Hal tersebut akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang dimanifestasikan dengan sikap politik saat momentum pilkada. Kemenangan Joko Widodo dan Rudi Hadyatmo dengan angka 90,09% pada pilkada kedua 2010 menjadi bukti akan hal tersebut. Rumusnya sederhana ‘Kalau rakyat makmur, pemimpin masyhur’” (wawancara pada Senin, 25 Mei 2015, di Solo).

Sementara, menurut Umar Hasyim (wawancara pada Kamis, 28 Mei 2015 di Solo) meyakini, ada relasi kuat antara blusukan dengan elektoral. Menurutnya, setiap orang pasti suka dan senang bertemu dengan pemimpinnya. Dengan adanya kebanggaan bertemu sang gubernur, maka, akan melahirkan simpati dan berefek pada tingkat elektoral.

Simpulan

Dari tujuh model kepemimpinan yang penulis gunakan, tampak dengan jelas ada lima model yang terkait, yakni kepemimpinan pelayan, kepemimpinan horisontal, kepemimpinan populis, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan demokratis.

Kelima model kepemimpinan tersebut tercermin dalam satu model kepemimpinan yang khas Joko Widodo yakni blusukan. Blusukan telah membuat nama Joko Widodo semakin populer tidak hanya di Solo serta di Indonesia, bahkan di dunia internasional --- sehingga, ia mendapatkan julukan sebagai “*the street democracy*”, “*Jokowi, a Governor at Home on the Streets*”, dan “*man of the peopl*”. Selanjutnya, banyaknya tokoh dunia, seperti pendiri media sosial Facebook Mark Zuckerberg, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, dan lainnya yang tertarik ingin merasakan langsung blusukan agar dapat membuktikan kuatnya citra atau identitas tersebut dalam kepemimpinan Joko Widodo. *Blusukan* seperti telah menjadi milik Joko Widodo. Secara tegas dapat dikatakan, Joko Widodo adalah blusukan dan blusukan adalah Joko Widodo.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa blusukan merupakan ciri yang sangat menonjol dalam kepemimpinan politik Joko Widodo. *Blusukan* merupakan cara Joko Widodo untuk men-

getahui persoalan langsung dari tangan pertama. *Blusukan* juga merupakan implementasi kerendahan hati seorang pemimpin, karena, pemimpin memang harus melayani bukan dilayani. Selain itu, pemimpin yang melakukan blusukan juga harus bersiap menerima berbagai risiko, karena blusukan merupakan pola kerja pemimpin yang hampir tanpa jarak dengan rakyatnya. Salah satunya prosedur keamanan.

Terkait teori Foucault yang mengatakan bahwa kekuasaan itu menyebar, Joko Widodo *blusukan* adalah merupakan perwujudan atas model kekuasaannya yang tidak elitis. Joko Widodo merubah cara lama --- pengetahuan dan kebijakan tentang pembangunan kota di produksi dengan cara kerja kekuasaan yang hirarkis --- sementara, ia merancang pembangunan kota dengan menggunakan sumber daya rakyat yang bertalian pada pengetahuan maupun keinginan rakyat. Contohnya, Kampung Deret bisa terwujud karena pengetahuan dan konsensus atas konsep tersebut melibatkan rakyat secara langsung. Joko Widodo memberi pesan kepada rakyat bahwa politisi harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri dan kelompok. Politisi harus selalu dekat dengan rakyat agar bisa paham masalah dan berbagai harapan mereka. Pada konteks tersebut, blusukan adalah jalan terbaik yang diyakini dan dijalankan oleh Joko Widodo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy Adams 2007. *Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007.
- Alfian, M Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Best Steven, dan Kellner, Douglas, 2003. *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*. Terj. Indah Rohmani. Malang. Boyan Publishing.
- Gatot Suradji, Engelbertus Martono, 2014. *Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Jawa Barat*: Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Harrison Lisa, 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

sitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Hellström, Anders, 2013. *Help! The Populists Are Coming Appeals to the People in Contemporary Swedish Politics*, MIM Working Papers Series No 13:4. Sweden: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö University, 2013. Hal 9.

Artikel:

HAR, *Pencatutan Nama: Jokowi Ingatkan Reputasi Tak Dibangun Semalam*, Kompas, 19 November 2015.

Internet:

Aji, Wahyu, *Alasan Jokowi Blusukan Pasar Tradisional*, <http://www.tribunnews.com>. (diakses tanggal 10 september 2014).

Kartodirdjo. Sartono (Penyunting), 1984. *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

_____, *Menggali Makna Spanduk Negeri Auto Pilot*, 2012, <http://www.tribunnews.com>, (diakses tanggal 7 Februari 2016).

Mulyono, Slamet. 2008. *Kamus Pepak Basa Jawa*. Jogjakarta: Pustaka Jogjakarta Widyatama.

Akuntono, Indra, *Jokowi: Demokrasi Itu Turun ke Rakyat*, 2014, <http://nasional.kompas.com>, (diakses tanggal 10 September 2014).

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

_____, *Jokowi: Lelang Jabatan Usul dari Masyarakat*, 2013, <http://megapolitan.kompas.com>, diakses tanggal 6/12/2015.

Ridwansyah, Ardhi. 2013. *Leadership. 3.0*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Aprillatu, Pramirvan Datu, *Kritik lelang jabatan ala Jokowi bermunculan*, 2013, <http://www.merdeka.com>, (diakses tanggal 10 September 2014).

Saefullah, Eep, 2012. "Sebuah Harapan Bernama Jokowi", dalam *Joko Widodo: dari jualan kursi hingga dua kali mendapat kursi*. oleh Zaenuddin HM. Jakarta: Ufuk Press.

Asril Sabrina, *Reporter Cilik: Bapak Presiden Pernah Stres, Enggak?*, 2015, <http://nasional.kompas.com>. (diakses tanggal 29 Desember 2015)

Sarup Madan, 2007. *Posstrukturalisme Dan Pos modernisme; Sebuah Pengantar Kritis*. Yogyakarta; Jendela.

Charles H, Green, *The New Leadership is Horizontal, Not Vertical*, 2013, <http://trustedadvisor.com>, (diakses tanggal 18 Maret 2015).

Sutanto, Teguh. 2013. *Belajar Kepemimpinan Jawa Dari Soekarno Hingga Jokowi*. Yogyakarta: Buku Pintar.

Zulkifli Ahmad, 2012. *Stories of The Great Leader*, Depok: ONCOR Semesta Ilmu.

Dahana Radhar Panca, *Salah Tafsir Jokowi*, 2014, <http://lipsus.kompas.com>. (diakses tanggal 19 Januari 2016).

Skripsi:

Mustafa, Hadi, *Kepemimpinan Karismatik: Studi Tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)*. Skripsi, Univer-

Danu, Aris, *Megawati Dinilai Membawa Kharismatik Bung Karno*, 2015, <http://m.inilah.com>, (diakses tanggal 6 Februari 2016).

Gunadha Reza, *Lelang Jabatan Ala Jokowi*

- Solusi Putuskan 'Rantai' Nepotisme*, 2013, <http://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 6/12/2015.
- Hasits, Muhammad, *5 Sebutan untuk Jokowi dari media asing*, 2013, <http://www.merdeka.com>, (diakses tanggal 18 Maret 2015).
- Kessler, V, *Leadership and power. Koers - Bulletin for Christian Scholarship; Vol 75, No 3*, 2010. <http://koersjournal.org.za>, (diakses tanggal 18 Maret 2015).
- Maharani Ardini, *Coba Blusukan ala Jokowi, PM Malaysia Malah Kena Diare*, 2015, <http://www.merdeka.com> (diakses tanggal 5 Februari 2016)
- Meilikah, KPK: *Kepala Daerah Paling Banyak Tersangkut Korupsi*, 2014, <http://microsite.metrotvnews.com>, (diakses tanggal 12 September 2014).
- Muryadi, Wahyu, *Dua Tahun Bersama Gus Dur Di Istana*, _____, <http://tempointeraktif.com>, (diakses tanggal 8 Februari 2016).
- Pertiwi, Atmi, *Setahun Menjabat, Jokowi Diminta Kurangi Blusukan*, 2013, <http://www.tempo.co>, (diakses 11 September 2014).
- Wattimena, Reza A.A, *Kepemimpinan Blusukan*, 2013, <http://rumahfilsafat.com>. (diakses tanggal 18 Agustus 2014).
- Widodo, Joko, *Metro This Week*, Metro TV. <http://www.youtube.com>, (diakses tanggal 1 Juli 2014).
- Wiradi, Gunawan, *Belajar Memahami Populisme*, 2013, www.sajogyo-institute.or.id, (diakses tanggal 8 Maret 2015).
- _____, *Definition of Management By Walking Around: _____*, <http://economictimes.indiatimes.com>, (diakses tanggal 24 Agustus 2014).
- _____, *Minat Kartu Jakarta Sehat tinggi*, 2013, <http://www.bbc.co.uk> (diakses tanggal 10 September 2014).
- _____, *Presiden Apresiasi Pemda Yang Lelang Jabatan*, 2013, <http://setkab.go.id>. (diakses tanggal 10 September 2014).
- _____, *Jokowi Bicara Kepemimpinan - Kampus UII, Humas UII*, 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=jqEYZbhmYfI>, (diakses tanggal 2 Me 2015).
- Wawancara:**
- Arif, Akbarudin. Wawancara pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 di Solo.
- Hasyim, Umar. SE. Wawancara pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 di Solo.
- Hadisantoso, Kukuh . Wawancara pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 di Jakarta.
- Indah. Wawancara pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di Solo
- Kadarwati, Sri. Wawancara pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 di Solo.
- Muluk, Hamdi,. Wawancara dengan Hamdi Muluk, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 di Jakarta
- Sadi, Dwi Laksana. Wawancara dengan Dwi Laksana Sadi, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2015 di Jakarta.
- Setyawan, Fery. Wawancara pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 di Solo.
- Simanjuntak, Jhonny. SH. Wawancara pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 di Jakarta.
- Subagyo, Gatot. Wawancara pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 di Solo.
- Sukasno, YF. Wawancara pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 di Solo.
- Sulistyo Eko, Wawancara pada hari Senin,

tanggal 18 Mei 2015 di Jakarta.

Sumantri, Joni Hari. Wawancara pada hari Rabu,
tanggal 27 Mei 2015 di Solo.

Sutomo, Rachmat. Wawancara pada hari Kamis,
tanggal 28 Mei 2015 di Solo.

Taufiqurrahman. Wawancara pada hari Senin,
tanggal 14 September 2015 di Jakarta.

Piliang, Yasraf A, Dr. MA. Wawancara pada
tanggal 9 Mei 2014 di Bandung.



**SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NASIONAL**